

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan yang berjalan secara berkelanjutan guna mencapai kondisi kehidupan yang lebih baik. Pembangunan wilayah secara umum memiliki tujuan untuk mengembangkan wilayah ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan potensi wilayah untuk mensejahterahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan adalah terciptanya lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakatnya untuk menikmati hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Suryana (2000) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk dalam suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, dimana pembangunan ekonomi ini sebagai suatu proses berarti perubahan yang terus menerus dan berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Todaro & Smith (2003), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu (1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), (2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, (3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Menurut Rustiadi et al (2009) pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung mengabaikan terjadinya ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan antar wilayah merupakan suatu permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, ketidakmerataan merupakan konsekuensi yang sulit dihindari. Karakteristik yang berbeda di setiap wilayah memberikan pengaruh yang kuat terhadap pola pembangunan ekonomi, sehingga menyebabkan pola pembangunan antar wilayah tidak seragam. Ketidakseragaman tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan tumbuh, dan pada akhirnya mengakibatkan beberapa wilayah tumbuh dengan cepat dan sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat. Kemampuan tumbuh yang berbeda inilah yang akan menimbulkan kesenjangan. Permasalahan kesenjangan dalam pembangunan masih didominasi oleh permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya akses masyarakat perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan dan wilayah tertinggal terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi (Harafera, 2011).

Salah satu wilayah yang mengalami ketidakmerataan adalah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota memiliki perbedaan karakteristik pada setiap wilayahnya, perbedaan letak geografis dan potensi sumber daya yang berbeda di setiap wilayah inilah yang menyebabkan pola pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Barat menjadi tidak seragam dan menyebabkan kemampuan untuk berkembang antar wilayahnya berbeda, perbedaan kemampuan berkembang inilah yang pada akhirnya menyebabkan

terjadinya ketimpangan. Ketimpangan berupa pembangunan maupun hasil, ketimpangan pembangunan meliputi ketimpangan pendapatan perkapita dan ketimpangan dalam kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Ketimpangan ini terjadi antara daerah-daerah yang berada di wilayah Jawa Barat bagian utara dengan daerah-daerah di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

Wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian selatan dinilai lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian utara. Hal ini terjadi dikarenakan karakteristik wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian selatan berbeda dengan karakteristik wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian utara. Wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian selatan mengandalkan sektor pertanian dan pariwisata, tidak seperti wilayah-wilayah di Provinsi Jawa Barat bagian utara yang mengandalkan sektor industri dalam sumber kegiatan perekonomian.

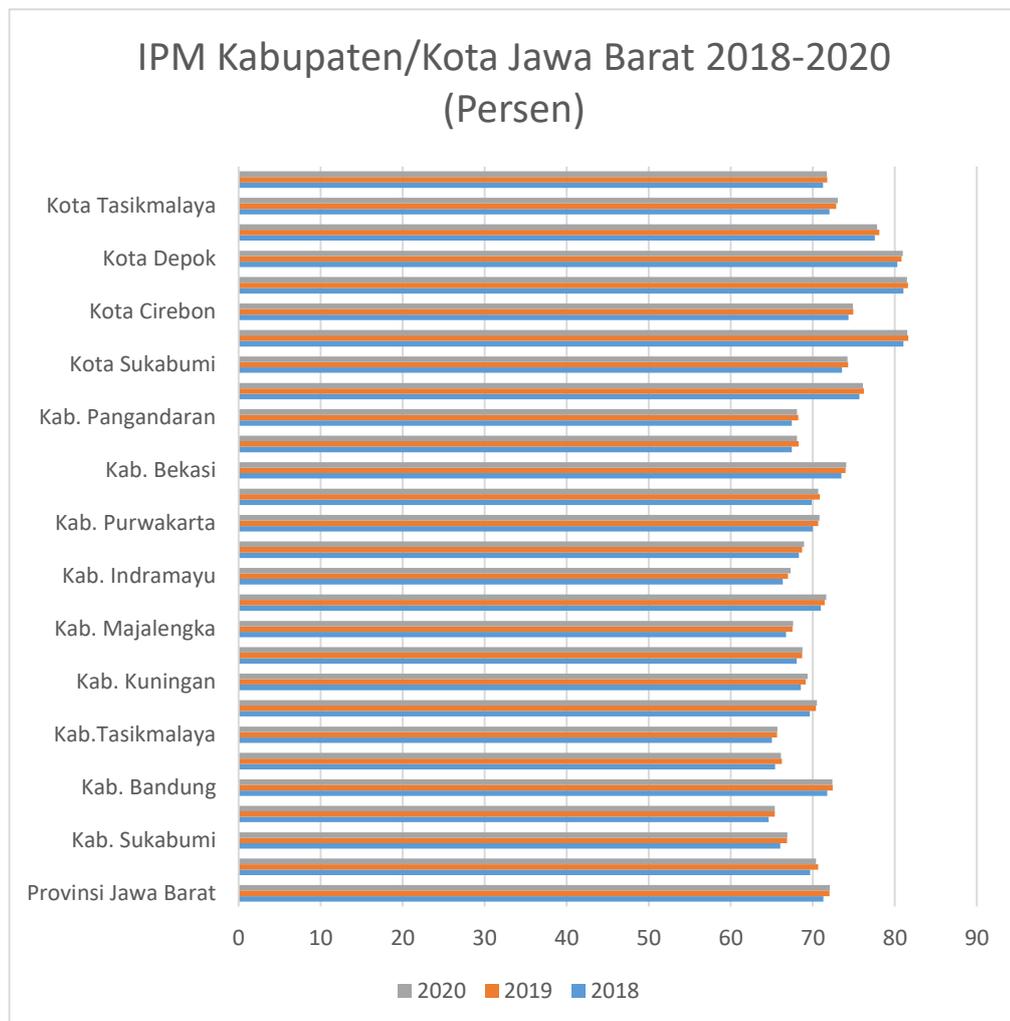
Adapun wilayah yang termasuk ke dalam Jawa Barat bagian selatan adalah wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Pantai selatan yang terdiri dari Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Sedangkan yang termasuk ke dalam Jawa Barat bagian utara adalah wilayah lainnya yang tidak berbatasan dengan Pantai Selatan yang terdiri dari Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kota

Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar.

Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena sumber daya manusia yang unggul dapat menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih baik. Peran manusia dalam pembangunan merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai alat dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya.

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara tahunan dalam *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang, dimensi pendidikan, dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita. Apabila ketiga indikator tersebut mengalami kenaikan, maka dapat dikatakan bahwa kualitas hidup manusia telah mengalami peningkatan dan tingginya nilai

IPM menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut BPS, IPM diklasifikasikan menjadi 4 kategori yakni,  $IPM < 60$ , rendah ;  $60 \leq IPM < 70$ , sedang;  $70 \leq IPM < 80$ , tinggi; dan  $IPM \geq 80$ , sangat tinggi (BPS, 2015). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan angka IPM yang tinggi di Indonesia. Berikut merupakan persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat yang terjadi selama tahun 2018 sampai tahun 2020:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Gambar 1.1 IPM Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa selama periode 2018-2020, wilayah dengan nilai IPM tertinggi adalah Kota Bandung dan diikuti oleh Kota Bekasi dan Kota Depok, dengan nilai IPM menyentuh angka 80%. Sebaliknya wilayah dengan nilai IPM terendah adalah Kabupaten Cianjur dengan angka 65%. Selain itu, berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat juga bahwa secara keseluruhan, tingkat IPM di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2020 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 IPM Provinsi Jawa Barat adalah sebesar,71,30% kemudian pada tahun 2019 IPM Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi 72,03%, dan pada tahun 2020 IPM Provinsi Jawa Barat kembali meningkat menjadi 72,09%. Meskipun IPM Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan, sehingga IPM Provinsi Jawa Barat perlu lebih ditingkatkan lagi.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk terus meningkatkan kualitas manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut KBBI, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan pembuatan mendidik. Pendidikan berperan dalam mengembangkan manusia menjadi sumber yang produktif dan memiliki kemampuan profesional dalam meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pendidikan dalam indeks pembangunan manusia adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS). Rata-rata lama sekolah didefinisikan

sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan tingkat pendidikan masyarakat secara keseluruhan (BPS, 2014). Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, maka semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang dijalani. Untuk mengetahui kondisi RLS di Pulau Jawa dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1.1 RLS Pulau Jawa Tahun 2020**

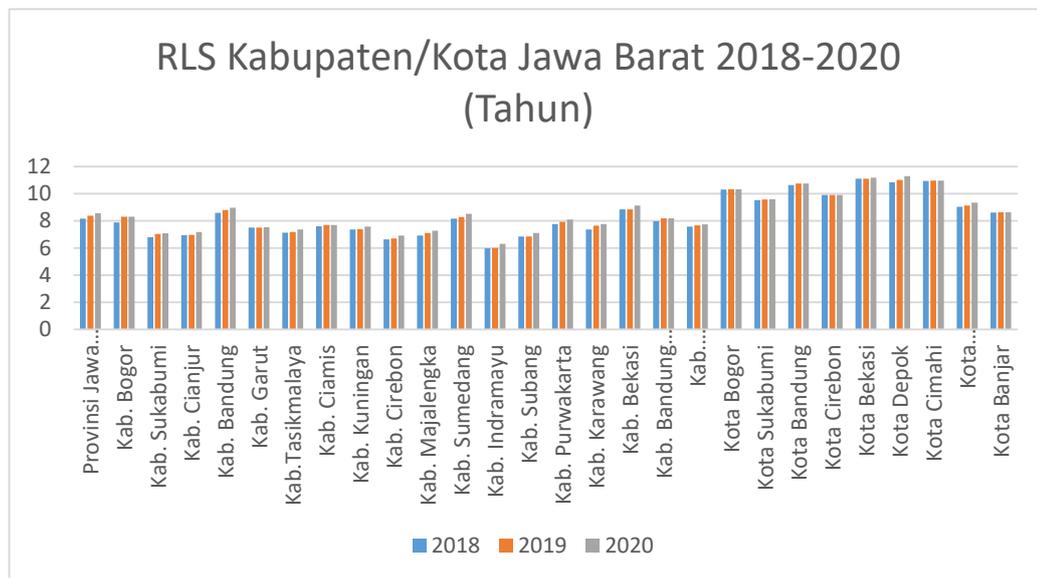
<b>Provinsi</b>	<b>Nilai RLS (Tahun)</b>
DKI Jakarta	11,13
D. I. Yogyakarta	9,55
Banten	8,89
Jawa Barat	8,55
Jawa Timur	7,78
Jawa Tengah	7,69

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dari tabel 1,1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 Provinsi dengan nilai RLS tertinggi di Pulau Jawa adalah DKI Jakarta dengan RLS sebanyak 11,13 tahun, peringkat kedua yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan RLS sebanyak 9,55 tahun, peringkat ketiga yaitu Provinsi Banten dengan RLS sebanyak 8,89 tahun. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke empat dengan RLS sebanyak 8,55 tahun. Peringkat kelima yaitu Provinsi Jawa Timur dengan RLS sebanyak 7,78 tahun, dan terakhir Provinsi Jawa Tengah dengan RLS sebanyak 7,69 tahun.

RLS Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke-4 dari 6 Provinsi, dengan RLS lebih rendah dibandingkan Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Banten. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan di Provinsi Jawa

Barat masih kurang baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa dan masih harus ditingkatkan lagi. Secara lebih lanjut RLS pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Gambar 1.2 RLS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa RLS pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan gambar 1.2 dapat juga dilihat bahwa daerah dengan nilai RLS tertinggi pada tahun 2020 adalah Kota Depok dengan nilai RLS 11,28 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA). Sebaliknya daerah dengan nilai RLS terendah pada tahun 2020 adalah Kabupaten Indramayu dengan nilai RLS 6,3 tahun atau setara dengan kelas 6 Sekolah Dasar (SD). Gambaran perbandingan RLS di Kota Depok dan Kabupaten Indramayu menjadi sebuah perbandingan yang

kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup besar dalam hal pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pendidikan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan total dari nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah dalam satu periode tertentu. Supartoyo (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa laju pertumbuhan modal manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Modal manusia merujuk pada stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang. Pendidikan ialah salah satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Perkembangan PDRB ADHK pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui gambar berikut:

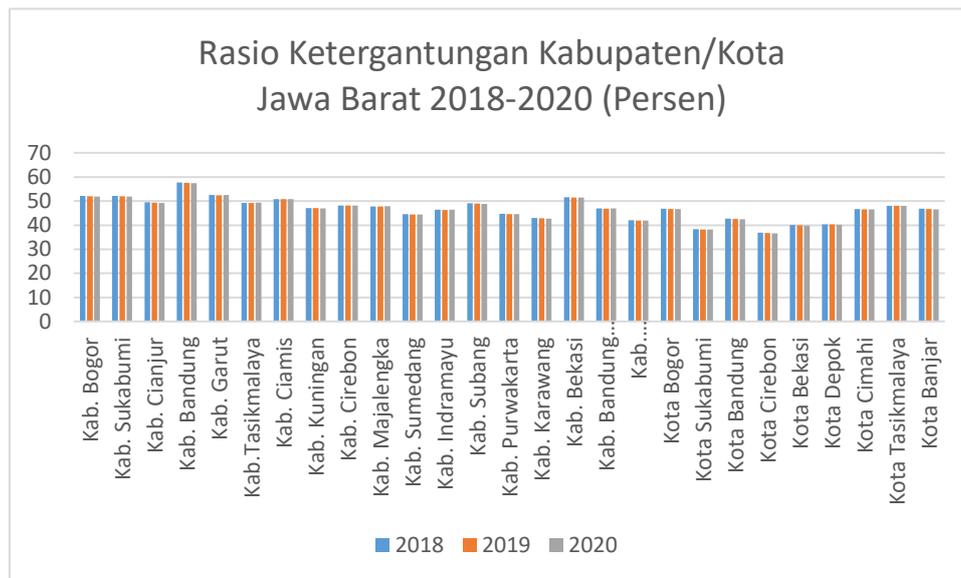


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Gambar 1.3 PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018-2020 mengalami perkembangan yang tidak stabil. Pada tahun 2019 PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan, akan tetapi pada tahun 2020 PDRB pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena adanya pandemic Covid-19 yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan kegiatan perekonomian. Berdasarkan gambar 1.3 dapat juga dilihat bahwa daerah dengan nilai PDRB tertinggi adalah Kabupaten Bekasi, sedangkan daerah yang memiliki nilai PDRB terendah adalah Kota Banjar.

Selain PDRB, rasio ketergantungan penduduk atau *dependency ratio* merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi permintaan pendidikan. Rasio ketergantungan penduduk adalah perbandingan penduduk yang berusia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk yang berusia produktif (antara 15 hingga 64 tahun). Semakin banyak angka ketergantungan, maka semakin meningkat pula tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Meningkatnya tuntutan atau beban hidup yang harus dipenuhi dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran rumah tangga karena penduduk berusia produktif menjadi harus mengeluarkan sebagian pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk membiayai pendidikan sampai pada jenjang yang diinginkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, rasio ketergantungan penduduk pada Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Gambar 1.4 Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 wilayah dengan rasio ketergantungan penduduk paling rendah adalah Kota Bekasi dengan nilai sebesar 36,58%, sedangkan wilayah dengan rasio ketergantungan penduduk paling tinggi adalah Kabupaten Garut dengan nilai sebesar 57,50%. Dari gambar 1.4 juga dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 terus mengalami penurunan yang tidak signifikan. Pada tahun 2018 rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 49,14%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 48,96%, dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 48,83%.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi rata-rata lama sekolah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang cukup serius yang

dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2014). Oleh karena itu orang-orang miskin akan kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Rata-rata persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat melalui gambar berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

**Gambar 1.5 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Jawa Barat**

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat diketahui bahwa perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tidaklah stabil. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 7,45%, kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi sebesar 6,91%, akan tetapi pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Jawa Barat kembali meningkat menjadi sebesar 7,88%. Dari gambar 1.5 juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2020. Dari gambar 1.5 juga dapat dilihat bahwa wilayah dengan persentase penduduk miskin paling rendah adalah Kota Depok dengan persentase penduduk miskin sebesar 2,45%, sedangkan wilayah dengan persentase penduduk miskin paling tinggi adalah Kota Tasikmalaya dengan persentase penduduk miskin sebesar 12,97%.

Dari berbagai fenomena dan data-data yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah sehingga judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah "Pengaruh PDRB, Rasio Ketergantungan Penduduk, dan Kemiskinan terhadap Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah diuraikan di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan perkembangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat serta wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat periode 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, rasio ketergantungan penduduk, dan tingkat kemiskinan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat, wilayah utara Jawa Barat, dan wilayah selatan Jawa Barat selama periode 2011-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan perkembangan rata-rata lama sekolah yang terjadi di Provinsi Jawa Barat serta wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat periode 2011-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB, rasio ketergantungan penduduk, dan tingkat kemiskinan terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Barat, wilayah utara Jawa Barat, dan wilayah selatan Jawa Barat selama periode 2011-2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rata-rata lama sekolah.
2. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai sumber informasi dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya pada kajian ilmu sejenis.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran dan evaluasi dari setiap ilmu yang telah didapatkan baik dari dalam ruang perkuliahan maupun di luar ruang perkuliahan.

#### **2. Bagi Pembuat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan serta pertimbangan bagi pemerintah Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan.